
REDEFINISI KETAHANAN NASIONAL GUNA MEWUJUDKAN KETAHANAN REGIONAL DI ASIA TENGGARA

Rizky Hikmawan

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

rizkyhikmawan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis redefinisi konsep ketahanan dalam konteks regionalisme. Ketahanan Regional sebagai isu strategis diperhadapkan dengan perbedaan kepentingan nasional dan sistem masing-masing negara anggota yang terlebih dahulu eksis. Tulisan ini kemudian menjabarkan analisis Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) dalam meneropong prospek ketahanan Regional Asia Tenggara. bergulirnya ASEAN Community (Komunitas ASEAN) di akhir tahun 2015 mengarahkan negara anggota untuk mewujudkan integrasi yang lebih mendalam. Hal ini akan interdependensi antar negara anggota akan semakin meningkat yang dapat menjadi peluang maupun ancaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan regional merupakan sesuatu yang dituju oleh ASEAN. Namun tak ada Tidak ada pengertian maupun penjelasan yang operatif dari istilah tersebut. Peluang untuk membentuk ketahanan regional selalu ada, hanya saja, perlu ada solusi untuk mengatasi persoalan klasik di ASEAN ada beberapa faktor penyebab kegagalan implementasi ketahanan regional secara nyata. Pertama, adanya ego dari setiap negara anggota yang lebih mengedepankan kepentingannya sendiri. Kedua, adanya pemaknaan subyektif atas ASEAN Way, terutama prinsip non-intervensi, Ketiga, mindset dari negara anggota atas makna ketahanan regional itu sendiri yang masih bersifat sempit sehingga tidak melihat manfaatnya di masa depan ketika krisis telah terjadi.

Key Words : Regionalisme, Ketahanan Regional, Asean, Asean Community, Interdependensi

Pendahuluan

Ketahanan nasional (Tannas) adalah isu strategis dalam kajian keamanan Indonesia. Hal ini dikarenakan fungsinya sebagai sarana bagi Bangsa Indonesia dalam mempersiapkan diri menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan,

hambatan, dan gangguan (ATHG), baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Dengan adanya Tannas yang kuat diharapkan dapat menangkal beragam masalah yang ada sekaligus meneguhkan identitas dan kelangsungan hidup

berbangsa dan bernegara. Memasuki era globalisasi, ATHG yang ada justru menjadi lebih kompleks. Negara sulit untuk mengatasi ATHG tersebut secara mandiri dan membutuhkan kehadiran aktor lain untuk saling bekerja sama. Aktor-aktor tersebut dapat berasal dari lingkungan strategis Indonesia yang paling dekat, yakni kawasan Asia Tenggara. Salah satu aktor tersebut adalah *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang merupakan institusi regional dimana Indonesia berada. Bagi Indonesia ASEAN merupakan elemen vital bagi kepentingan nasional. Tidak mengherankan jika Indonesia menjadikan ASEAN sebagai soko guru kebijakan luar negeri.

Selain itu, bergulirnya *ASEAN Community* (Komunitas ASEAN) di akhir tahun 2015 dapat menjadi sarana bagi Indonesia untuk meningkatkan kerjasama, baik dengan sesama negara ASEAN maupun pihak ketiga di luar institusi tersebut. Kehadiran Komunitas ASEAN mengarahkan negara anggota untuk mewujudkan integrasi yang lebih mendalam. Hal ini akan mengakibatkan ketergantungan antar negara anggota akan

semakin meningkat. Jika ketergantungan ini bisa senantiasa diarahkan pada hal-hal positif, seperti intensitas kerjasama, tentu akan membawa dampak yang baik bagi negara anggota. Akan tetapi, jika ketergantungan ini justru mengikat negara anggota pada hal-hal negatif, tentu dapat berbalik menjadi ancaman.

Guna menghadapi ancaman tersebut negara-negara anggota ASEAN harus mampu mendorong ketahanan nasional menjadi ketahanan regional. Perwujudan ketahanan regional adalah suatu hal yang harus diprioritaskan. Hal ini mengingat kemunculan ancaman-ancaman baru, baik karena faktor alamiah maupun manusiawi, yang mengancam eksistensi dari negara dan manusia itu sendiri. Dengan adanya ketahanan regional diharapkan mampu mewujudkan stabilitas kawasan, baik keamanan maupun ekonomi, yang lebih terukur. Nantinya, adanya ketahanan regional yang kuat secara langsung akan menguatkan ketahanan nasional setiap negara anggota.

Akan tetapi, penulis berpendapat perlu adanya redefinisi makna ketahanan itu sendiri. Hal ini dikarenakan definisi

ketahanan yang ada saat ini, khususnya di Indonesia, bersifat sempit dan terbatas karena cenderung berada dalam pendekatan militeristik serta hanya fokus pada upaya pencegahan dari ATHG yang dipersepsikan. Padahal jika merujuk pada kata *resilience*, yang merupakan padanan kata ketahanan dalam bahasa Inggris, maka ketahanan seharusnya tidak hanya dipandang dari pendekatan militeristik, melainkan menekankan pada sisi kemanusiaan, baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, ketahanan, dalam konteks *resilience*, tidak hanya membahas kesiapan dalam melakukan pencegahan semata, tetapi mencakup tiga kondisi, yaitu: kesiapan dalam mencegah krisis; kesiapan dalam menghadapi dan mengatasi krisis yang telah terealisasi; dan kesiapan untuk bangkit dari krisis menuju kondisi normal.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi lebih mendalam makna ketahanan nasional yang selama ini dipahami di Indonesia. Penulis akan mengkontestasikan makna tersebut dengan istilah *resilience* yang juga diartikan sebagai ketahanan. Hasil redefinisi konsep ketahanan akan diajukan ke level regional.

Penulis berargumen bahwasanya keberadaan ketahanan regional justru dapat menjadi *safety net* bagi ketahanan nasional setiap negara anggota. Penulis akan membagi tulisan ini ke dalam beberapa bagian, yaitu: (1) pendahuluan yang berisi masalah yang diajukan; (2) konsep ketahanan nasional yang berlaku di Indonesia; (3) redefinisi konsep ketahanan nasional dengan menggunakan pendekatan makna *resilience*; (4) sekarah perkembangan regionalisme di Asia Tenggara; (5) implementasi ketahanan nasional untuk ketahanan regional di Asia Tenggara dengan mengedepankan interaksi antara negara anggota dengan ASEAN; (6) penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Konsep Ketahanan Nasional

Pada dekade 1960an salah satu isu yang menarik perhatian kalangan militer di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SSKAD –sekarang Seskoad) adalah perkembangan Komunisme di Asia, khususnya di Cina yang kemudian menyebar ke Vietnam, Laos, dan Kamboja (Sunardi, 1997, p. 12). Guna menghadapi perkembangan tersebut beberapa perwira ABRI dan peserta Kursus Reguler

Angkatan I (KRA I) tahun 1965 mengembangkan sebuah konsep yang berjudul Ketahanan Revolusi. Dalam perkembangannya konsep ketahanan revolusi kemudian dikembangkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas)¹ menjadi ketahanan nasional (Tannas) di tahun 1968. Awalnya konsep Tannas dimaksudkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup sekaligus proses pertumbuhan bangsa dan negara Indonesia. Satu tahun setelahnya, Lemhanas membuat definisi baru Tannas, yakni “keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia.” Pada tahun 1972 Lemhanas mengeluarkan beberapa

keputusan, termasuk menetapkan pusat perhatian Tannas, yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta untuk mengamankan perjuangan mengejar tujuan nasional (Lemhanas, 2015).

Pengembangan konsep Tannas dilakukan mengikuti cara pandang pemerintahan Orde Baru yang saat itu berkuasa. Tannas dapat diartikan sebagai alat pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara dengan mengedepankan identitas dan kepentingan nasional yang meliputi persoalan ideologi, ekonomi, sosial maupun militer. Hal ini dapat terlihat jelas dari pengertian Tannas yang dikemukakan oleh Presiden Soeharto, yaitu:

*“National resilience
encompasses ideological
resilience based on nation’s*

¹ Pada saat pembentukannya 20 Mei 1965, Lemhanas adalah Lembaga Pertahanan Nasional. Baru pada 2 Februari 1994 kepanjangan Lemhanas diubah menjadi Lembaga Ketahanan Nasional. Perubahan nama tersebut dimaksudkan agar Lemhanas lebih meningkatkan lagi peran dan fungsinya dalam menyelenggarakan tugas pokok yang diembannya. Selain itu, perubahan kata pertahanan menjadi ketahanan dianggap tidak memiliki dampak besar mengingat sejak awal pendiriannya Lemhanas juga turut membicarakan masalah ketahanan. Bahkan sebutan Pertahanan

Nasional mengandung arti ketahanan dari suatu bangsa yang sedang berevolusi. Lihat, Sejarah dan Perkembangan Lemhanas RI, <http://www.lemhannas.go.id/index.php/tentang-lemhannas/sejarah>, diakses pada 1 Januari 2018. Sementara Sayidiman Suryohadiprojo menjelaskan bahwa perubahan tersebut dikarenakan makna ketahanan yang lebih luas, ketimbang pertahanan yang cenderung hanya menyangkut satu aspek semata, yakni militer (Suryohadiprojo, 1997).

own identity which receives the full support of the entire nation, economic resilience capable of meeting the nation's own basic needs, social resilience which ensures the feeling of solidarity and harmony among these peoples, and an appropriate military resilience to face aggression from outside. Without national resilience we shall always be afraid" (Anwar, 1998).

Dalam perkembangan selanjutnya, Tannas kemudian diartikan sebagai suatu kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional (Suryosumarto, 1998).

Luhulima (2005) kemudian menyatakan bahwa Tannas dapat dilihat dari dua sisi: ke dalam dan ke luar. Sisi

pertama adalah kemampuan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial yang perlu sambil mempertahankan identitas diri. Sementara sisi kedua berarti kemampuan untuk menghadapi ancaman dari luar, apapun bentuknya dan dari manapun datangnya. Kemampuan negara dalam merealisasikan dua sisi Tannas, bagi Suryohadiprojo (1997), akan menghasilkan dua hal, yaitu keamanan dan kesejahteraan nasional. Kedua output tersebut bagaikan dua sisi mata uang yang senantiasa mempengaruhi satu sama lain. Untuk itu perlu adanya keselarasan di antara kedua istilah itu.

Adapun Wan Usman berusaha memberikan definisi Tannas yang lebih sederhana, yakni aspek dinamis suatu bangsa, meliputi semua aspek kehidupan untuk tetap jaya ditengah keteraturan dan perubahan yang selalu ada. Dari definisi tersebut Usman kemudian menjelaskan setidaknya ada tiga hal yang melatarbelakangi Tannas, yaitu: kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya; kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara

sehingga ia selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar; dan ketahanan suatu bangsa untuk tetap jaya, mendukung makna keteraturan dan stabilitas, yang di dalamnya terkandung potensi untuk terjadinya perubahan (Wan Usman, 2003, p. 5).

Kekuatan yang dimaksud dapat ditinjau dari delapan aspek kehidupan yang dikenal dengan istilah *Astagatra*. Kedelapan aspek tersebut dibagi ke dalam dua bagian: (1) unsur alamiah (statis) yang terdiri dari tiga aspek (*trigatra*), yaitu: letak geografis, sumber daya alam dan demografis (penduduk); (2) unsur sosial (dinamis) yang terdiri dari lima aspek, yaitu: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam (pertahanan dan keamanan). Dengan demikian untuk mengatasi beragam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG), negara harus mampu memaksimalkan segenap potensi yang dimiliki untuk mencapai kekuatan nasional. Kekuatan nasional yang dimiliki diharapkan akan mampu mewujudkan Tannas yang, secara umum,

meliputi keamanan nasional dan kesejahteraan nasional. Dua hal ini yang menjadi syarat keberlangsungan suatu negara. Tanpa adanya keamanan, niscaya kesejahteraan akan sulit untuk diwujudkan. Begitupula sebaliknya, tanpa adanya kesejahteraan, maka dapat menghadirkan ancaman yang mengganggu stabilitas keamanan.

Dari penjelasan di atas, konsep Tannas dapat dikatakan bersifat sempit atau terbatas karena senantiasa ditinjau dari sudut pandang militeristik. Ada empat argumentasi yang dapat dikedepankan terkait pernyataan sebelumnya. *Pertama*, kendatipun memiliki konsep *Astagatra*, pemaknaan Tannas cenderung ditinjau dari perspektif pertahanan dan keamanan (Hankam). Hal ini dapat dimaklumi mengingat latar belakang Tannas yang dikembangkan oleh perwira ABRI. Selain itu, isu ketahanan selalu berada dalam otoritas Lemhanas yang awalnya merupakan lembaga pertahanan. Konsekuensinya, konsep Tannas, bersamaan dengan Wawasan Nusantara (Wanus), mengalami stagnansi karena hanya dilihat dari satu perspektif semata.

Akibatnya konsep Tannas lebih mengarah pada doktrin keamanan nasional (Acharya, 1998). Doktrin tersebut bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada segenap rakyat. Output yang kemudian diharapkan dari penanaman doktrin tersebut adalah dengan meningkatnya kontribusi rakyat dalam menjaga kedaulatan maupun kepentingan-kepentingan negara guna merealisasikan tujuan nasional.

Kedua, untuk memudahkan indoktrinasi yang dimaksud pada poin pertama digunakanlah dua pendekatan, umum dan khusus. Pendekatan umum adalah upaya yang dilakukan oleh negara untuk menanamkan doktrin Tannas melalui mata pelajaran maupun mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sementara pendekatan khusus dilakukan dengan diselenggarakannya program pendidikan khusus yang bersifat terbatas. Dalam hal ini, Lemhanas diberikan wewenang untuk mengadakan pelatihan tersebut dalam bentuk Program Pendidikan Reguler. Jika dilihat dari komposisi pengajar maupun peserta, maka kebanyakan berasal dari tentara maupun polisi. Bahkan pendidikan

ini dijadikan salah satu jenjang kedinasan yang harus dilalui oleh polisi maupun tentara apabila ingin mendapatkan promosi kepangkatan. Di tahun 2017, dalam pertemuannya dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, Gubernur Lemhanas, Agus Widjojo, mengusulkan pendidikan Lemhanas juga menjadi salah satu syarat jenjang karir bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) (Erdianto, 2017).

Ketiga, sayangnya indoktrinasi yang dilakukan dalam poin kedua tidak memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Hal ini dikarenakan materi pendidikan yang disampaikan hanya berada dalam tataran konseptual, sedangkan indikator untuk mengukur Tannas secara nyata di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah jelas. Jikapun mau menggunakan Astagatra sebagai dimensi Tannas, maka kedelapan unsur yang termasuk di dalamnya harus diturunkan ke ranah operasional agar bisa diukur dengan nyata. Tanpa adanya indikator yang jelas, maka Tannas akan senantiasa berada dalam tataran ide, wacana, maupun konsep semata tanpa memperhatikan implementasinya di

dalam masyarakat. Nantinya dikhawatirkan konsep Tannas hanya menjadi doktrin semu yang terus direproduksi kepada masyarakat, tetapi minim hasil yang nyata. Padahal Tannas adalah konsep strategis guna menjaga kedaulatan sebagai sarana mewujudkan tujuan nasional.

Keempat, konsep Tannas yang dikembangkan lebih menekankan aspek pencegahan. Artinya Tannas hanya berupaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya krisis akibat ATHG yang ada. Penekanan terhadap aspek pencegahan bisa dipahami mengingat definisi Tannas yang bersifat militeristik sehingga, secara tidak langsung, menekankan aspek keamanan sebagaimana yang telah disinggung pada poin pertama. Akan tetapi, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana jika ATHG telah berhasil menembus keamanan nasional dan menciptakan krisis? Bukankah krisis akibat ATHG bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, walaupun telah memiliki sistem keamanan yang kuat? Peristiwa 9/11 di Amerika Serikat (AS) seharusnya dapat menjadi catatan penting dalam membangun ketahanan nasional. Belum lagi jika kita mengaitkan isu-isu non-keamanan, seperti

lingkungan, sebagai ATHG potensial bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, implementasi konsep Tannas tidak boleh berhenti pada aspek pencegahan semata.

Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat permasalahan yang ditimbulkan dari definisi Tannas yang selama ini kita pahami. Oleh karena itu, perlu adanya redefinisi makna Tannas agar mampu berfungsi secara lebih efektif dalam mengatasi ATHG yang dapat menghadirkan krisis. Melalui pendekatan *resilience*, konsep ketahanan nasional nantinya dapat diimplementasikan pada tiga kondisi, yaitu: (1) kesiapan dan kemampuan negara dalam mencegah ATHG yang dapat menimbulkan krisis; (2) kesiapan dan kemampuan negara dalam menghadapi sekaligus mengatasi krisis yang telah terealisasi; dan (3) kesiapan dan kemampuan negara untuk bangkit dari krisis menuju kondisi normal.

Redefinisi Konsep Ketahanan Nasional

Makna ketahanan yang diidentikkan dengan pertahanan merupakan suatu hal yang lumrah jika ditinjau dari segi bahasa.

Hal ini dikarenakan akar kedua kata tersebut sama, yakni ‘tahan’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata ‘tahan’ memiliki arti: (1) tetap keadaannya (kedudukan dan sebagainya) meskipun mengalami berbagai-bagai hal; (2) tidak lekas rusak (berubah, kalah, luntur, dan sebagainya); (3) dapat menyalurkan (menguasai) diri; betah; (4) sanggup dan tidak lekas merasa jijik (kasihan dan sebagainya); (5) cukup (sampai atau hingga) (BPPB, 2005). Dari pengertian pertama dan kedua, baik ketahanan dan pertahanan berupaya untuk menjaga keadaan tertentu dari beragam ATHG agar tidak lekas rusak atau kalah. Perbedaan di antara keduanya lebih pada sumber ATHG itu sendiri. Jika ketahanan memiliki dimensi luas, yakni Astagatra, maka pertahanan fokus pada aspek militer (Hankam). Dari pembagian ini sebenarnya dapat diambil kesimpulan sederhana bahwa pertahanan merupakan bagian dari ketahanan.

² Sebelum menjelaskan lebih mendalam, penulis hendak menyatakan di dalam beberapa tulisan akademik, kata *resilience* telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi resiliensi. Namun untuk keperluan penyusunan artikel ini, penulis tetap akan mengartikan *resilience* sebagai ketahanan.

Permasalahan kemudian muncul ketika kata ketahanan dipadankan dengan *resilience* dalam bahasa Inggris.² Terdapat perbedaan makna secara mendasar di antara keduanya. *Resilience* berasal dari bahasa latin ‘*resile*’ yang berarti ‘*to rebound*’ atau ‘*recoil*’ yang berarti memantul (The Young Foundation, 2012). Secara terminologis, David Omand (2005) memberikan definisi dimana *resilience* atau ketahanan adalah kemampuan yang dimiliki untuk menyerap guncangan dan untuk bangkit kembali ke dalam bentuk awal atau setidaknya mampu mencegah keretakan atau bahkan runtuhnya sistem secara menyeluruh. Sementara Philippe Bourbeau (2013) mengartikan *resilience* sebagai kemampuan untuk pulih atau menyesuaikan diri dari kemalangan, kesulitan, ketidaknyamanan, konflik, kegagalan dan/atau perubahan. Adapun Patrick Martin-Breen dan Marty J. Andries menyatakan makna ketahanan sebagai berikut:

“... something is resilient if it can resist external forces,

Setidaknya hal ini disebabkan oleh pandangan sebagian besar masyarakat yang masih mengartikan *resilience* dengan ketahanan. Termasuk dalam hal ini adalah translasi Lemhanas dalam bahasa Inggris menjadi *National Resilience Institute*.

shocks, and disturbances and can quickly return to its normal state ... individuals, communities, and societies are resilient if they can withstand and recover (or in colloquial terms 'bounce back') from shocks, such as death of a loved one, loss of a job or a natural disaster such as an earthquake or flood” (Fjäder, 2014).

Ketahanan sendiri memiliki cakupan makna yang dapat diterapkan ke dalam beragam bidang keilmuan. Awalnya kata tersebut digunakan dalam bidang teknik untuk menguji kemampuan suatu materi terhadap tekanan dari luar (The Young Foundation, 2012). Christian Fjäder (2014) lebih jauh menjelaskan:

“The most common and colloquial use of the term resilience, however, derives from the material sciences, in which the term is used prevalently in engineering design, and in particular towards understanding the behavior and properties of specific materials in relation to their purpose, for example in the design of structures, such as support beams and bridges. In this context, the measure of resilience is defined based on how much force (or 'stress') the material

can withstand without breaking or permanently altering its shape under stress, how much it bends under stress and how fast it returns to its original shape after the stress or force is relieved.”

Dari penjelasan di atas kata ketahanan kemudian dikembangkan sesuai bidang ilmu yang menerapkannya tanpa mengubah substansi yang ada. Pada dekade 1940an kata tersebut digunakan dalam studi psikologi sosial dan psikiatri. Penggunaan istilah ketahanan dimaksudkan untuk melihat dan menunjukkan kemampuan seorang anak untuk bangkit kembali setelah mengalami masa sulit dan traumatik, seperti kematian ataupun perceraian orang tua (The Young Foundation, 2012). Hal ini sejalan dengan penjelasan Reivich dan Shatte (2002) mengenai ketahanan sebagai kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan dengan bertahan dalam keadaan tertekan dan bahkan berhadapan dengan kesengsaraan atau trauma yang dialami dalam kehidupannya.

Memasuki dekade 1970an dan 1980an kata ketahanan diadaptasi oleh

studi ekologi dan psikologi komunitas untuk menjelaskan fenomena yang berbeda. Dalam bidang psikologi komunitas, ketahanan berusaha menggambarkan kelompok yang tidak mengalami perubahan perilaku kendatipun berada dalam kondisi sulit. Sementara dalam bidang ekologi, ketahanan digunakan untuk menggambarkan ekosistem yang terus berfungsi walaupun di tengah kesulitan (Community and Regional Resilience Institute (CARRI), 2013). Secara khusus, dalam pembahasan mengenai perubahan iklim, *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) (2014) menyatakan bahwa ketahanan adalah:

“ The capacity of social, economic, and environmental system to cope with a hazardous event or trend or disturbance, responding or reorganizing in ways that maintain their essential function, identity, and structure, while also maintaining the capacity for adaptation, learning and transformation. ”

Dari ranah ilmu Hubungan Internasional (HI), Bourbeau (2013) menemukan beberapa tulisan yang

mengawinkan konsep ketahanan dengan isu-isu HI, seperti: *global governance*, kedaulatan, maupun masa depan NATO's pasca Perang Dingin. Selain beberapa tema di atas, konsep ketahanan juga dapat digunakan oleh penstudi HI untuk menganalisis isu politik internasional (2015) maupun keamanan nasional (Fjäder, 2014). Tidak hanya itu, konsep ketahanan kini turut digunakan dalam memahami fenomena regionalisme yang terjadi di suatu kawasan. Hal inilah yang kemudian memunculkan istilah ketahanan regional (Ibrahim, Zarina, & Idris, 2014).

Dari penjelasan di atas, kita dapat menarik benang merah bahwasanya ketahanan dalam konteks *resilience* tidak bisa hanya dipahami sebagai kesiapan dalam menghadapi ATHG. Kesiapan hanyalah menjadi salah satu fase dalam mewujudkan ketahanan itu sendiri. Ponomarov dan Holcomb berpendapat ketahanan dapat dipahami dengan membaginya ke dalam tiga fase, yaitu: kesiapan dan kesiagaan; respon dan adaptasi; serta pemulihan atau penyesuaian (Ridley, 2017). Fase kesiapan dan kesiagaan menuntut individu, komunitas

maupun negara (subyek) untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi beragam kemungkinan ancaman yang datang. Ancaman tersebut bisa muncul dari dalam maupun luar diri subyek. Selain itu, ancaman juga bisa muncul karena kesengajaan ataupun ketidaksengajaan. Persiapan diri tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas material maupun mental. Sementara itu, fase respon dan adaptasi berbicara mengenai kesiapan subyek ketika ancaman itu telah menjadi kenyataan. Subyek yang sebelumnya telah mempersiapkan diri akan lebih mudah merespon dan beradaptasi dalam situasi buruk yang menimpa. Disinilah kapasitas materi dan mental yang telah disiapkan sebelumnya akan diuji sampai sejauh mana kedua hal itu akan bertahan dan membawa subyek keluar dari kesengsaraan. Adapun fase ketiga pemulihan dan penyesuaian dilakukan setelah ancaman berlalu. Adanya kapasitas materi dan mental yang kuat akan menjadi kunci bagi pemulihan dan penyesuaian dalam situasi yang ada. Umumnya, materi akan lebih rentan untuk habis atau hilang. Akan tetapi, selama subyek memiliki mental yang kuat untuk

bangkit, maka pemulihan dan penyesuaian akan lebih mudah dilakukan.

Reivich dan Shatte (2002) kemudian menyatakan bahwa ketahanan memiliki tiga fungsi ketika kesengsaraan akibat adanya krisis telah melanda. *Pertama, overcoming*, yakni kemampuan manusia untuk mengatasi kesengsaraan yang dialami. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah cara pandang kesengsaraan yang ada dari yang bersifat negatif menjadi positif. *Kedua, steering through* yang akan menggunakan sumber dalam dirinya, yakni keyakinan terhadap diri sendiri (*self efficacy*) untuk memandu dan mengendalikan dirinya guna mengatasi kesengsaraan yang ada. *Ketiga, bouncing back* yaitu kemampuan untuk bangkit kembali dari kesengsaraan menuju kondisi sebelumnya atau normalisasi keadaan.

Selain itu, obyek ketahanan pada dasarnya tidak hanya melekat pada negara, melainkan turut merujuk individu dan komunitas (masyarakat). Dalam konteks individu, ketahanan adalah kemampuan manusia untuk menghadapi, mengatasi dan menjadi kuat atas kesulitan yang dialaminya (Grotberg, 1999). Menariknya,

ketika krisis telah terjadi ketahanan yang diimplementasikan dapat memiliki sisi paradox. Di satu sisi ketahanan membicarakan pengalaman yang menyakitkan. Sedangkan di sisi lain adanya ketahanan yang kuat dapat menjelma menjadi potensi kekuatan yang dapat muncul dari pengalaman tersebut. Setidaknya terdapat tujuh karakteristik utama yang harus dimiliki subyek untuk memiliki ketahanan, yaitu: (1) *insight* dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri tentang sesuatu, baik dirinya maupun orang lain, untuk kemudian dijawab dengan jujur; (2) *kemandirian* dengan menjaga jarak, baik secara emosional maupun fisik, dari masalah yang dihadapi seseorang; (3) menjalin *hubungan* yang jujur dan saling mendukung dengan orang lain; (4) *inisiatif* untuk bertanggungjawab atas masalah yang dihadapi; (5) *kreatif* dengan melibatkan kemampuan berpikir alternatif terkait tantangan hidup; (6) memiliki *humor* dalam menjalani kesengsaraan; (7) adanya *moralitas* pada nilai-nilai tertentu yang mengarah pada kebaikan dan produktivitas (Wolin & Wolin, 1999).

Ditinjau dari sisi komunitas, ketahanan adalah kemampuan layaknya sebuah sistem untuk menyerap guncangan dan masih mampu mempertahankan fungsi dan struktur dasar (Lerch, 2015). Komunitas menjadi salah satu aktor krusial dalam ketahanan mengingat peran mereka yang dapat mendorong individu untuk bangkit. Selain itu, komunitas adalah pihak yang dapat mengumpulkan, menampung, menjaga, dan mendistribusikan material-material ketahanan yang dibutuhkan. Komunitas disini dapat ditinjau dalam skala kecil, seperti RT/RW, hingga skala besar, seperti negara. Tentu saja semakin besar skalanya menandakan semakin kompleks pula upaya yang dapat dilakukan guna mewujudkan ketahanan.

Setidaknya ada dua alasan mengapa ketahanan perlu dibangun dari level komunitas. *Pertama*, komunitas adalah wadah yang berinteraksi langsung dengan aspek kebutuhan hidup masyarakat. Merekalah yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan beragam kebijakan publik, seperti: kesehatan, pendidikan, hukum, transportasi, pertanahan, tata kota, dan

sebagainya. *Kedua*, pembangunan kapasitas ketahanan di level komunitas akan mendorong peran aktif masyarakat. Hal ini disebabkan interaksi masyarakat dalam sebuah komunitas akan lebih kuat mengingat faktor interpersonal maupun pemikiran dan sikap saling membutuhkan di antara sesama mereka. Kedua aspek di atas tidak akan mungkin dibangun tanpa melekatkan dua hal, yaitu: menumbuhkan kesadaran akan pentingnya tanggungjawab individu dalam mewujudkan ketahanan komunitas; dan menekankan pentingnya proses dalam mewujudkan ketahanan komunitas yang mampu mengatasi situasi-situasi tertentu maupun tantangan yang dihadapi komunitas secara umum (Lerch, 2015).

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat perbedaan mendasar antara ketahanan *ala* Indonesia dengan ketahanan dalam konteks *resilience*. Ketahanan yang selama ini dipahami di Indonesia lebih bersifat preventif atau upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan. Sementara dalam konteks *resilience* upaya preventif atas kemungkinan ancaman yang ada hanyalah salah satu fase saja dari makna

ketahanan itu sendiri. Untuk itu, penulis berpendapat perlu adanya redefinisi mengenai makna ketahanan yang diakui semua pihak. Tujuannya tidak lain agar kata tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dalam masyarakat, khususnya jika krisis tersebut telah terjadi dan membawa kesengsaraan bagi masyarakat.

Dari Ketahanan Nasional Menuju Ketahanan Regional

Bagi Indonesia, wacana ketahanan regional bukanlah isu baru. Dalam berita yang dikeluarkan oleh Kantor Berita Antara pada 12 Desember 1976, diterangkan bahwa keberadaan Tannas diharapkan mampu mendorong terwujudnya ketahanan regional yang nantinya dapat mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas dan netral (soeharto.co, 2017). Dalam penelusuran studi kepustakaan yang penulis temukan, isu ketahanan regional juga telah dijadikan obyek penelitian. Misalnya, disertasi oleh R. H. Purnomo Mirhad dengan judul “Ketahanan Regional ASEAN: Suatu Pendekatan Pemantapan Kerjasama Regional Dipersepsikan dari Teori Ketahanan Nasional” (WorldCat, 2017). Begitupula dengan tulisan Hary

Bagyo (1991) yang ditujukan sebagai kertas kerja program pendidikan Lemhanas dengan judul “Kerjasama Pengaturan Keamanan ASEAN untuk Menunjang Ketahanan Regional.” C. P. F. Luhulima (2005) juga sempat membahas isu tersebut dalam *book chapter* yang berjudul “Ketahanan Regional dan Nasional: Dasar untuk Diplomasi Regional Indonesia.” Hanya saja penekanan Tannas dalam literatur tersebut masih dalam pendekatan pertahanan dan keamanan semata. Menariknya, penulis mendapati Lemhanas pernah melakukan seminar di tahun 2015 dengan judul “*Strengtening ASEAN Regional Resilience: Opportunities and Challenges.*” Salah satu pembicara seminar tersebut adalah Ms. Yukiko Okano dari Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia. Dalam presentasinya Okano menjelaskan definisi ketahanan, dari konteks *resilience*, dan pengalaman Jepang ketika menghadapi gempa bumi besar pada tahun 2011 (Mission of Japan to ASEAN, 2015). Sayangnya melihat perkembangan Tannas saat ini, sepertinya penjelasan Okano belum dijadikan referensi bagi pemerintah untuk meredefinisi makna ketahanan.

Kini dengan berlakunya Komunitas ASEAN membuat redefinisi Tannas harus segera dilakukan dan diimplementasikan, bukan hanya di level nasional, melainkan juga regional. Sebagian kalangan tentu akan mempertanyakan urgensi pembentukan ketahanan regional saat ini. Tetapi, penulis beranggapan bahwa saat ini kebutuhan akan eksistensi ketahanan regional tidak lagi bisa ditunda. Setidaknya ada tiga alasan mendasar mengapa hal ini patut dikedepankan. *Pertama*, ketahanan regional merupakan salah satu tujuan dari keberadaan ASEAN. Hal ini dapat dilihat pada Piagam ASEAN Pasal 1 (Ayat 2) yang berbunyi, “*to enhance regional resilience by promoting greater political, security, economic and socio-cultural cooperation*” (ASEAN, 2007). Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ketahanan regional merupakan sesuatu yang dituju oleh ASEAN. Namun persoalannya kemudian adalah apa yang sebenarnya dimaksud ASEAN dengan ketahanan regional tidaklah jelas. Tidak ada pengertian maupun penjelasan yang operatif dari istilah tersebut. Hasilnya, setiap negara anggota, termasuk ASEAN sendiri, memiliki interpretasi yang tidak sama. Oleh

karenanya redefinisi dan penetapan makna ketahanan regional yang diakui setiap *stakeholder* ASEAN menjadi persoalan yang tidak bisa ditunda lagi.

Kedua, perkembangan globalisasi telah mengarah pada era ketidakpastian dimana politik, ekonomi dan perdamaian dunia tidak bisa diprediksi secara jelas. Kebangkitan Cina dan sikap AS dalam meresponnya menjadi kunci dalam memahami gejolak politik global saat ini. Tetapi, tidak ada satupun pakar ataupun teori yang dapat menjelaskan sekaligus memprediksi akhir dari persaingan tersebut. Secara geopolitik, Asia Tenggara merupakan medan pertarungan yang strategis bagi kedua kubu yang bersaing. Melimpahnya sumber daya alam, jumlah populasi yang signifikan, kondisi ekonomi yang relatif stabil, ditambah letaknya di jalur perdagangan internasional membuat kawasan ini diperebutkan oleh kekuatan besar dunia. Untuk itu, negara-negara Asia Tenggara, begitupula ASEAN sebagai institusi regional harus mampu berpikir rasional dan mengambil langkah kebijakan yang cerdas lagi bijak. Keuntungan-keuntungan yang dimiliki oleh kawasan

Asia Tenggara seharusnya dapat menjadi nilai tawar guna menghadapi hegemoni Cina dan AS. Namun di sisi lain, jika tidak mampu memainkan kartunya dengan cerdas dan bijak, niscaya Asia Tenggara hanya akan menjadi obyek maupun boneka dua negara kuat tersebut. Untuk itulah, negara-negara Asia Tenggara harus mempersiapkan diri dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk dari situasi yang ada saat ini.

Ketiga, salah satu cara untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan global kontemporer adalah dengan membangun ketahanan regional yang kuat dan solid. Ketahanan regional sejatinya merupakan mekanisme antisipasi dalam menghadapi segala kemungkinan terburuk dari beragam ATHG yang ada, termasuk efek samping persaingan Cina dan AS. Oleh karenanya ada atau tidaknya ATHG saat ini, seharusnya jangan menjadi penghambat bagi proses pembentukan ketahanan regional. Hal ini mengingat ketahanan regional baru bisa terasa manfaatnya ketika ATHG telah muncul. Dengan demikian mempersiapkan segala kemungkinan munculnya ATHG tetap

lebih utama, ketimbang tidak mempersiapkannya sama sekali dan disesali ketika krisis telah terjadi. Sebagai contoh, salah satu aspek ATHG yang patut diwaspadai adalah munculnya efek domino ketika terjadinya krisis. ASEAN tentu patut belajar dari efek domino krisis ekonomi yang dibawa Yunani bagi negara-negara Uni Eropa lain, seperti: Irlandia, Italia, Portugal, dan Spanyol. Untuk kasus Asia Tenggara sendiri, efek domino semacam itu juga pernah terjadi ketika Thailand mengalami krisis moneter yang berimbas ke negara lainnya pada tahun 1997.

Hanya saja, harus diakui, pembentukan ketahanan regional di Asia Tenggara tidaklah semudah yang dibayangkan. Setidaknya ada tiga hal mendasar yang harus sepakati terlebih dahulu sebelum pembentukan ketahanan regional dapat terealisasi. *Pertama*, bagaimana negara anggota memaknai ketahanan, pada umumnya, dan ketahanan nasional, khususnya. Bisa saja ada negara yang telah beranjak menuju pemahaman Tannas yang bersifat komprehensif. Tetapi, tidak menutup kemungkinan pula ada negara yang masih memaknai ketahanan

nasional dari sudut pandang militeristik dan fokus pada pencegahan semata. Tanpa adanya kesamaan makna dari negara-negara yang bernaung di dalamnya, niscaya tidak akan ada yang namanya ketahanan regional, kecuali jika istilah tersebut hanya disematkan sebagai jargon semata.

Kedua, keinginan dari negara untuk merealisasikan ketahanan regional. Hal ini menunjukkan negara pada hakikatnya tetap memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan di tingkat regional. Kebijakan-kebijakan yang diambil tentunya berkaitan erat dengan kepentingan nasional dari negara yang bersangkutan. Sehingga apabila negara tetap menganggap bahwa pembangunan internal lebih penting, ketimbang penguatan eksternal, maka sulit untuk mewujudkan ketahanan regional. Tetapi, setidaknya negara harus mampu berpikir rasional karena bisa saja eksistensi dan penguatan eksternal dalam bingkai regionalisme, termasuk pembentukan ketahanan regional, menjadi jalan efektif bagi perwujudan kepentingan maupun tujuan nasional.

Ketiga, jikapun negara bersedia untuk merealisasikan ketahanan regional,

maka yang harus diperhatikan adalah penentuan isu-isu apa saja yang akan diprioritaskan. Hal ini mengingat isu-isu dalam ketahanan regional bersifat luas. Disinilah negosiasi antar negara anggota akan menjadi krusial. Negara-negara anggota akan menetapkan isu-isu yang hendak dijadikan prioritas dalam ketahanan regional. Penetapan skala prioritas tersebut dapat ditentukan dari klasifikasi isu-isu apa saja yang memiliki dampak langsung bagi keamanan nasional suatu negara. Hanya saja, negosiasi dapat berlangsung alot apabila terjadi perbedaan dalam memandang sebuah isu. Bisa saja suatu negara anggota merasa isu lingkungan, misalnya, penting untuk dikedepankan, tetapi tidak krusial untuk negara lainnya.

Apabila ketiga persoalan di atas telah diatasi, maka tahapan selanjutnya adalah pola apa yang akan digunakan untuk merealisasikan ketahanan regional? Sebenarnya terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu: *top-down* (institusionalisme), *bottom-up* (negara ke institusi), dan penggabungan dua pendekatan sebelumnya. Mengingat situasi dan kondisi yang ada saat ini, maka sulit

rasanya mengharapkan peran dari ASEAN untuk menjadi lokomotif perubahan. Hal ini didasari oleh pola intergovernmentalisme yang dominan dalam ASEAN. Hasilnya ASEAN seringkali mendapati peran sebagai fasilitator semata, sedangkan peran utama tetap berada di tangan negara. Begitupula dengan opsi pendekatan ketiga yang juga sulit dilakukan mengingat lemahnya posisi tawar dari ASEAN terhadap negara anggotanya. Untuk itu, pendekatan yang dapat dilakukan saat ini adalah *bottom-up* dengan mengedepankan peranan negara sebagai agen yang hendak mengubah struktur.

Pendekatan negara sebenarnya adalah model klasik yang selama ini telah dilakukan. Logika yang coba dibangun adalah kemampuan negara dalam membangun ketahanan nasional yang kuat akan berdampak bagi perwujudan ketahanan regional. Untuk itu, Luhulima menjelaskan kekuatan nasional setiap negara harus dipupuk dan dibina secara berkesinambungan sehingga “setiap bangsa akan mencapai tingkat dan kondisi ketahanan nasional yang akan melahirkan ketahanan regional. Lebih lanjut peneliti

senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu juga menerangkan:

“Apabila setiap bangsa Asia Tenggara mengembangkan ketahanan nasionalnya masing-masing dalam semangat solidaritas dan kerjasama regional ASEAN, maka berangsur-angsur akan tumbuh suatu ketahanan regional, yaitu kemampuan negara-negara anggota untuk menyelesaikan bersama-sama masalah-masalah yang dihadapi bersama dan mengamankan masa depan dan kesejahteraan bersama-sama dan tidak membiarkan masa depan itu ditentukan atau dicampuri oleh kepentingan lain dari luar. Apabila kemampuan itu dapat dikembangkan, maka Asia Tenggara akan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya, akan memiliki ketahanan regional, yang pada gilirannya dapat memberikan sumbangan yang lebih besar bagi perdamaian Asia dan perdamaian dunia pada umumnya” (Luhulima, 2005).

Jika pendekatan negara telah dilakukan sejak dulu, lantas apa yang menyebabkan pembentukan ketahanan regional belum terealisasi hingga saat ini?

Hal tersebut dikarenakan beberapa hal.

Pertama,

Secara historis, ASEAN adalah alat bagi negara anggota untuk mendapatkan kepentingannya. Terdapat tiga isu yang menyebabkan mengapa ASEAN dibentuk. *Pertama*, merealisasikan stabilitas kawasan guna mengamankan kepentingan domestik dari para pemimpin negara anggota. Sebagai negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan, konsolidasi internal adalah keharusan yang harus dilakukan. Belum lagi dengan munculnya tokoh maupun kelompok tertentu yang kelak akan menjadi pemimpin kuat di negara masing-masing, seperti: Presiden Soeharto di Indonesia, Perdana Menteri (PM) Lee Kuan Yew di Singapura, dan *United Malaya National Organization* (UMNO) di Malaysia. Untuk itu, politik konfrontasi yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia maupun krisis Sabah antara Filipina dan Malaysia tidak lagi boleh terjadi. Untuk menjaga stabilitas dan harmonisasi kawasan itulah ASEAN lahir.

Kedua, membendung pengaruh Komunisme dari Utara (Cina, Laos, Kamboja dan Vietnam). Kepentingan ini

juga didasari oleh persoalan domestik dimana beberapa negara anggota pendiri ASEAN menghadapi ancaman dari kelompok komunis. Dengan adanya ASEAN diharapkan mampu memperkuat jaringan kerjasama untuk mencegah infiltrasi ideologi komunis, terutama dengan keberhasilan Vietnam dalam menghadapi invasi AS, sekaligus mengusir paham tersebut dari Asia Tenggara.

Ketiga, para pemimpin negara anggota ASEAN juga menyadari bahwa dalam konteks Perang Dingin, ada kemungkinan infiltrasi ataupun invasi dari dua negara adidaya ke kawasan Asia Tenggara guna mengamankan kepentingannya. Terpecahnya Korea, Yaman dan Vietnam (sebelum disatukan kembali oleh Ho Chi Minh), merupakan bentuk dari *proxy war* kedua negara adidaya. Para pemimpin negara anggota ASEAN tidak ingin hal itu terjadi pada mereka. Oleh karenanya mereka memutuskan untuk membentuk ASEAN guna mengamankan kepentingan domestik mereka.

Sikap mengamankan kepentingan domestik di atas kepentingan regional juga

tampak dari lambannya pergerakan ASEAN sebagai sebuah institusi. Hal ini terlihat ASEAN baru memiliki perjanjian kerjasama secara menyeluruh pada tahun 1976 dengan disahkannya *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) atau sembilan tahun setelah dilangsungkannya Deklarasi Bangkok. Bahkan dalam dua puluh tahun pertama, boleh dikatakan ASEAN hanya mengedepankan peningkatan hubungan diplomatik sesama negara anggota agar mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi komunisme (Narine, 2002).

Semangat intergovernmentalisme di atas juga dikuatkan dengan adanya prinsip *ASEAN Way*. Pada perkembangannya *ASEAN Way* menjelma menjadi rezim yang dianut hingga saat ini. *ASEAN Way* sendiri merupakan konstruksi dari pemimpin negara-negara anggota terkait mekanisme dalam menjalankan ASEAN. Secara umum, *ASEAN Way* terdiri dari dua hal. *Pertama*, menekankan pengambilan keputusan melalui konsultasi informal di antara para diplomat yang memfasilitasi konsensus kelompok pada pertemuan resmi. *Kedua*, meliputi enam prinsip yang terdapat dalam Pasal 2 TAC,

yaitu: (1) menghormati kedaulatan negara; (2) kebebasan dari intervensi eksternal; (3) non-intervensi dalam urusan internal; (4) penyelesaian perselisihan dengan cara damai; (5) penolakan atas penggunaan persenjataan; (6) kerjasama (Leviter, 2010).

Sementara secara khusus, prinsip non-intervensi seringkali dianggap sebagai simbol identitas kolektif sekaligus faktor utama yang menjaga solidaritas negara-negara anggota ASEAN selama ini. Tidak mengherankan jika prinsip tersebut juga dianggap sebagai fondasi dasar *ASEAN Way* (Goh, 2003). Keberadaan *ASEAN Way*, di satu sisi dianggap menjadi penghalang bagi upaya integrasi regional yang lebih komprehensif dan mendalam. Namun dengan menerapkan *ASEAN Way*, institusi ini justru dianggap sukses karena berhasil menjaga stabilitas perdamaian di kawasan (Kimivaki, 2001).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya peluang untuk mewujudkan ketahanan regional senantiasa terbuka. Hanya saja, perlu ada solusi untuk mengatasi persoalan klasik di ASEAN ada beberapa faktor penyebab kegagalan implementasi ketahanan regional secara

nyata. *Pertama*, adanya ego dari setiap negara anggota yang lebih mengedepankan kepentingannya sendiri. *Kedua*, adanya pemaknaan subyektif atas *ASEAN Way*, terutama prinsip non-intervensi, digunakan sebagai *bumper* untuk menolak wacana, ide, maupun kebijakan yang ada di ASEAN ketika hal itu bertentangan dengan kepentingan nasional. *Ketiga*, *mindset* dari negara anggota atas makna ketahanan regional itu sendiri yang masih bersifat sempit sehingga tidak melihat manfaatnya di masa depan ketika krisis telah terjadi.

Apabila negara anggota mampu mengatasi persoalan tiga permasalahan dasar tersebut, maka upaya mewujudkan ketahanan regional akan terbuka lebar. Sudah saatnya ASEAN bertindak terbuka dan memprioritaskan, tidak hanya kepentingan negara, melainkan juga manusia agar mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi dan mengatasi krisis. Adanya ketahanan regional juga dapat menjadi pelindung awal yang menyerap berbagai macam ATHG yang hendak menyerang kepentingan maupun keamanan negara anggota. Terakhir, melalui ketahanan regional kita dapat berharap

akan terwujudnya stabilitas kawasan yang lebih terukur dan siap dalam menghadapi ATHG, baik dari internal maupun eksternal.

Penutup

Untuk menghadapi dinamika regional dan global yang sedang berlangsung, Indonesia tidak lagi bisa menggantungkan diri pada konsep Tannas yang selama ini digunakan. Hal itu dikarenakan konsep yang dikembangkan bersifat sempit karena ditinjau dari sudut pandang militeristik semata dan fokus pada aspek pencegahan. Sementara guna mewujudkan negara yang kuat, konsep Tannas harus menasar pada tiga kondisi, yaitu: kesiapan dan kemampuan dalam mencegah terjadinya krisis; kesiapan dan kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi krisis yang telah terealisasi; dan kesiapan dan kemampuan untuk bangkit dan menuju

kondisi normal pasca terjadinya krisis. Dengan adanya redefinisi Tannas ini diharapkan dapat berdampak bagi upaya perwujudan ketahanan regional di kawasan Asia Tenggara. Tujuannya adalah agar negara anggota dapat menjadikan ketahanan regional tersebut sebagai *safety net* apabila ada ATHG yang muncul dari sektor eksternal. Melalui ketahanan regional yang kuat, ATHG yang ada akan mampu diatasi di level regional sehingga tidak akan berdampak langsung bagi negara. Jikapun ATHG yang muncul berhasil menembus ketahanan regional, maka dampaknya terhadap negara anggota dapat diminimalisir. Namun keberhasilan implementasi ketahanan nasional dalam ketahanan regional sangat bergantung pada kebijakan negara anggota yang dominan dalam ASEAN dengan adanya *ASEAN Way*, khususnya prinsip non-intervensi dan konsensus.

Bibliography

- Acharya, A. (1998). Culture, Security, Multilateralism: The ASEAN Way' and Regional Order. *Contemporary Security Policy* , 19 (1), 55-84.
- Acharya, A. (2000). *The Quest for Identity: International Relations of Southeast Asia*. Oxford: Oxford University Press.
- Anwar, D. F. (1998). Indonesia: Domestic Priorities define National Security. In M. A. (ed.), *Asian Security Practice: Material and Ideational Influences* (pp. 201-250). Stanford: Stanford University Press.
- ASEAN. (2007). *ASEAN Charter*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Bagyo, H. (1991). *Kerjasama Pengaturan Keamanan ASEAN untuk Menunjang Ketahanan Regional*. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jakarta: Lembaga Pertahanan Nasional.
- Bourbeau, P. (2013). Resiliencism: Premises and Promises in Securitisation Research. *Resilience: International Policies, Practices and Discourses* , 1 (1), 3-17.
- BPPB, B. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chandra, A., Acosta, J., Stern, S., Uscher-Pines, L., Williams, M., Yeung, D., et al. (2011). *Building Community Resilience to Disasters: A Way Forward to Enhance National Health Security*. Rand Corporation. Santa Monica: Rand Corporation.
- Community and Regional Resilience Institute (CARRI). (2013). *Definitions of Community Resilience: An Analysis*. Washington DC: Community and Regional Resilience Institute (CARRI).
- Erdianto, K. (2017, Maret 29). *Pendidikan Lemhanas Diusulkan Jadi Syarat Jenjang Karier ASN*. Retrieved Februari 15, 2018, from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/22511691/pendidikan.lemhanas.diusulkan.jadi.syarat.jenjang.karier.asn>
- Fjäder, C. (2014). The Nation-State, National Security and Resilience in the Age of Globalisation. *Resilience: International Policies, Practices and Discourses* , 2 (2), 114-129.

- Flores, J. M., & Abad, J. (2012, July 9). *History: The Founding of ASEAN*. Retrieved January 15, 2018, from Association of Southeast Asian Nations: <http://asean.org/asean/about-asean/history/>
- Fry, G. W. (2008). *The Association of Southeast Asian Nations*. New York: Chelsea House.
- Goh, G. (2003). The 'ASEAN Way' Non-Intervention and ASEAN's Role in Conflict Management. *Stanford Journal of East Asian Affairs*, 3 (1), 113-118.
- Grotberg, E. H. (1999). *Tapping Your Inner Strength: How to Find the Resilience to Deal with Anything*. Oakland: New Harbinger Publications.
- Hettne, B. (2005). Beyond the 'New' Regionalism. *New Political Economy*, 10 (4), 543-571.
- International Panel on Climate Change. (2014). *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kimivaki, T. (2001). The Long Peace of ASEAN. *Journal of Peace Research*, 38 (1), 5-25.
- Lemhanas. (2015, Mei 20). *Sejarah dan Perkembangan Lemhanas RI*. Retrieved Januari 1, 2018, from Lemhanas: <http://www.lemhannas.go.id/index.php/tentang-lemhannas/sejarah>
- Lerch, D. (2015). *Six Foundations for Building Community Resilience*. Santa Rosa: Post Carbon Institute.
- Leviter, L. (2010). The ASEAN Charter: ASEAN Failure or Member Failure? *International Law and Politics*, 43, 159-210.
- Luhulima, C. P. (2005). Ketahanan Regional dan Nasional: Dasar untuk Diplomasi Regional Indonesia. In B. Bandoro, *Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia* (pp. 51-69). Jakarta: CSIS.
- Mission of Japan to ASEAN. (2015, September 11). *Press Release - Participation in the Lemhanas Seminar: Strengthening ASEAN Regional Resilience*. Retrieved April 19 2017, from Mission of

- Japan to ASEAN: www.asean.emb-japan.go.jp
- Narine, S. (2002). *Explaining ASEAN: Regionalism in Southeast Asia*. Boulder: Lynne Rienner.
- Omand, D. (2005). Developing National Resilience. *The RUSI Journal*, 150 (4), 14-18.
- Reivich, K., & Shatte, A. (2002). *The Resilience Factor: 7 Keys to Finding your Inner Strength and Overcoming Life's Hurdles*. New York: Three Rivers Press.
- Ridley, G. (2017). Resilience and National Security. In R. Dover, & H. D. Goodman, *The Palgrave Handbook of Security, Risk and Intelligence* (pp. 79-98). London: Palgrave Macmillan.
- soeharto.co. (2017, Januari 26). *Ketahanan Nasional Indonesia sebagai Sumbangan Ketahanan*. Retrieved April 19, 2017, from HM. Soeharto: soeharto.co
- Sunardi, R. M. (1997). *Teori Ketahanan Nasional*. Jakarta: Himpunan Alumni Studi Ketahanan Nasional (Hastanas).
- Suryohadiprojo, S. (1997). Ketahanan Nasional Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, II (I), 13-31.
- Suryosumarto, B. (1998). Reformasi dan Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, III (3), 49-65.
- The Young Foundation. (2012). *Adapting to Change: The Role of Community Resilience*. London: The Young Foundation.
- Wan Usman, d. (2003). *Daya Tahan Bangsa*. Jakarta: Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Wolin, S., & Wolin, S. (1999, Maret 29). *Resilience as Paradox*. Retrieved Januari 12, 2018, from Project Resilience: <http://www.projectresilience.com/resilience.htm>
- WorldCat. (2017, April 19). *Ketahanan Regional ASEAN: Suatu Pendekatan Pemantapan Kerjasama Regional Dipersepsikan dari Teori Ketahanan Nasional Indonesia*. Retrieved April 19, 2017, from OCLC WorldCat: www.worldcat.org

